

## ULASAN BUKU



### MENGUNGKAP FAKTA PEMBANTAIAN: DISKRIMINASI TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA

Judul Asli : Mihnatul Islam Fi Indonesia  
Karya Tim : Iddatu Askhas Amilu Li Hisab  
Tapol, 1985  
Penerjemah Arab : Ismail Shadhiq  
Penerbit : Zahratif, Mesir, 1989

Edisi Indonesia

Judul : Fakta: Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam  
Penerjemah Indonesia : Mohammad Tholib  
Editor : Irfan S. Awwas  
Karya : Tim Peduli Tapol. Amnesti Internasional  
Penerbit : Wihdhah Press, Yogyakarta, 1998  
Jumlah Halaman : 192 Halaman

#### *Ahmad Adaby Darban\**

**M** *ikhnatul* (bala'/tragedi) yang menimpa umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah dirasakan oleh umat selama hidup di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin maupun Rezim Orde Baru. Umat tahu dan merasakan adanya tekanan, intimidasi, penyeretan mubaligh yang sedang ceramah, sampai dengan penahanan dan pembantaian terhadap umat Islam. Namun demikian, umat dicekam oleh ketakutan untuk mengajukan protes dan menegakkan kebenaran karena selalu berhadapan dengan penguasa yang menggunakan pendekatan sekuriti dan depresi. Di samping itu, penguasa selalu menyembunyikan fakta dengan segala cara, antara lain media massa diancam tidak boleh memberitakan fakta yang sebenarnya. Sumber berita ditentukan oleh penguasa sehingga pers seakan menjadi corong penguasa pada zaman itu.

Dengan berbagai "skenario", Islam sebagai agama dan umat Islam Indonesia selalu diposisikan di pihak yang bersalah, seperti radikal dan teroris. Lambang-lambang Islam seperti  *Jihad* ,  *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* , kalimat Takbir diusahakan menjadi konotasi yang jelek. Padahal, itu semua merupakan  *Ruhul Islam (Spirit of Islam)*  yang harus tetap hidup dalam dada setiap muslimin. Kalimat-kalimat  *Jihad Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*  dan takbir selalu dihubungkan dengan makar dan berontak. Padahal, semua ini adalah perintah Allah SWT, Yang Maha Agung, dan punya andil besar dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk berani melawan penjajah hingga Indonesia merdeka.

Perbuatan tidak jujur, curang, dan sadis terhadap umat Islam itu, ibarat "membungkus bangkai", pasti akan tercium baunya, terbuka

\* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

perbuatan sadisnya. Munculnya buku ini merupakan salah satu bukti kekejaman, kesadisan, dan kecurangan Rezim Orde Baru. Ungkapan yang disajikan buku ini masih sangat terbatas, yaitu hanya sampai dengan tahun 1987, sedangkan peristiwa-peristiwa penindasan dan pembantaian terhadap umat Islam Indonesia masih terus berlangsung, seperti di Aceh. Meskipun demikian buku ini sangat penting, yaitu (1) sebagai tempat sumber dan fakta sejarah, (2) sebagai ungkapan pengadilan (proses pengadilan yang selama ini tidak diberitakan), dan (3) beberapa analisis tentang kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam Indonesia.

Buku ini menjelaskan proses sejarah mengapa terjadi konflik antara gerakan Islam dan kelompok militer di Indonesia. Gerakan Islam adalah gerakan yang dilakukan oleh umat Islam berdasarkan landasan ajaran agamanya, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sampai dengan kesejahteraan keadilan hidup bernegara di Indonesia. Mengapa kelompok militer Indonesia merasa kurang senang kepada organisasi-organisasi Islam? Dalam buku ini disebutkan, bahwa sejak zaman Jepang sudah terpola peta dan Hizbullah. Dalam peta lebih banyak dari unsur "abangan", sedangkan Hizbullah dari unsur "santri", (hlm.3). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pasukan Hizbullah menjadi kesatuan tentara yang dominan, khususnya di wilayah yang kuat Islamnya. Hizbullah tetap loyal kepada negara RI dan ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti aktif menumpas Pemberontakan PKI 1948. Hizbullah dan Peta merupakan eksponen cikal bakal terbentuknya TNI, kemudian baru muncul bekas-bekas KNIL (tentara Belanda) bergabung dalam TNI. Proses integrasi tidaklah mulus, sikap saling curiga muncul. Unsur Hizbullah selalu dicurigai dan batalyon-batalyon yang dikenal sebagai unsur Hizbullah diusahakan untuk dipecah sehingga sering terjadi konflik. Konflik-konflik itu terjadi karena kurang bijak dan kurang pendekatan, dari penguasa pada waktu itu. Dalam hal ini umat Islam yang selalu dijadikan sebagai pihak yang bersalah (hlm 4).

Demikian pula nasib yang dialami orpol Islam dan ormas Islam yang ada di Indonesia. Sering para penguasa mengadakan pendekatan dan bahkan memberikan peluang kepada orpol dan ormas Islam. Namun, dalam aspirasi ideologis ormas dan orpol Islam selalu dihalang-halangi dan ditekan sedemikian rupa. Sebagai contoh, Piagam Djakarta yang telah disahkan pada 16 Juli 1945 sebagai konsensus nasional, berhubungan di dalamnya terdapat tujuh kata "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya", diusahakan oleh kaum Islam phobia dan nonmuslim untuk dibatalkan. Juga ancaman dari Indonesia Bagian Timur akan keluar dari RI jika masih mencantumkan tujuh kata pada pembukaan UUD RI. Akhirnya, tuntutan itu dikabulkan meskipun sudah jadi konsensus nasional (hlm 2).

Kejadian-kejadian lain yang secara politis dan strategis menyudutkan potensi umat Islam. Kasus RUU Perkawinan yang konsepnya sangat sekuler dan sesungguhnya akan menggusur Hukum Perkawinan Islam yang sudah berjalan. Namun, umat Islam kompak menolak meskipun sudah siap akan diputuskan oleh DPR. RUU ini gagal total berkat demonstrasi besar dari umat Islam Indonesia.

Kasus pemaksaan Asas Tunggal bagi ormas dan orpol merupakan usaha strategis untuk menggusur Asas Islam bagi organisasi Islam. Penggusuran asas ini merupakan tindakan yang sangat tidak demokratis dan otoriter (pemaksaan). Bagaimana mungkin gerakan organisasi Islam yang menjadi saluran aspirasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah sosial dan politiknya tidak boleh memakai asas ajaran agamanya. Dengan hilangnya asas Islam bagi orsospol Islam dimungkinkan dapat mengaburkan aqidah dan Rukun Islam dalam cita-cita perjuangannya. Namun, RUU tentang azas tunggal itu dipaksakan berhasil menjadi UU pada tahun 1985 (hlm 18).

Dalam bidang ekonomi, masuknya modal asing dan pinjaman luar negeri sangat menolong pemerintah Orde Baru untuk

bangkit. Namun modal asing dan bantuan luar negeri itu tidaklah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, tetapi justru dipakai oleh para petinggi negara. Banyak para jenderal dan tentara memegang posisi dalam pemerintahan, berkolusi dengan tokoh-tokoh pengusaha Cina, memakai permainan lisensi untuk mendirikan perusahaan dan monopoli (hlm 20 – 21). Akibatnya, bantuan luar negeri dan modal asing hanya menumpuk di kalangan atas (pemimpin-pemimpin dan cukong-cukong di Jakarta). Sementara itu, pengusaha-pengusaha kecil (menengah ke bawah) yang sebagian besar umat Islam mengalami kebangkrutan (mati terdesak monopoli pengusaha besar). Ekonomi konglomeratlah yang dibangun oleh Orde Baru. Para konglomerat yang jiwa nasionalismenya tipis dengan mudah melarikan modalnya ke luar negeri. Akhirnya negara dan rakyat terkena dampak krisis ekonomi sampai saat ini.

Gelombang represif terhadap umat Islam terus dilakukan oleh Rezim Orde Baru. Konsep CSIS yang dijalankan oleh BAKIN di bawah pimpinan Ali Murtopo membuat *Skenario Jebakan* bernama “*Komando Jihad*” (Komji). Komji berfungsi sebagai *besi magnet* untuk menarik aktifis-aktifis muslim, yang kemudian ditangkap, dipenjarakan, disiksa, dan bahkan ada yang dibunuh. Operasi intelijen yang dilakukan Ali Murtopo merupakan alat politik Rezim Soeharto (hlm 26). Di samping itu, Komji mengadakan operasi intelijen untuk memecah belah organisasi massa/orsospol Islam. Contohnya, kasus pembajakan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) oleh John Naro. Pemerintah mengakui pembajakan itu dianggap sah dan dibela. Pengumuman tentang berbagai teror yang dilontarkan sebagai isu, biasanya diadakan pada momentum tertentu, seperti saat menghadapi pemilu, Sidang Umum MPR, pemilihan Presiden, pengesahan RUU di Sidang DPR (hlm 26), sebagai pemanas politik untuk menakuti umat Islam. Sekarang kita perlu mempertanyakan tentang berbagai isu “teroris” seperti kelompok Warman, Imron bin

Muhamad Zem (kasus Cicendo dan pembajakan pesawat Garuda di Thailand). Dalam persidangan kasus Imron, terbuka tabir bahwa kelompok Imron hanya diperalat oleh Badan Intelijen dalam usaha pihak militer untuk mendiskreditkan kaum Muslimin (hlm 27). Demikian halnya pada 4 Maret 1983, sebelum pemilihan presiden (Soeharto), para tokoh Islam di Jawa Timur menjadi sasaran penculikan yang dibekingi militer. Hal ini berjalan terus selama berbulan-bulan sehingga menewaskan ratusan orang (hlm 27).

Para muballigh Islam (para Da'wah) banyak yang dirintangi dan sering menjadi sasaran intimidasi. Membuat *black list* nama-nama muballigh, kemudian dikirim ke masjid-masjid, instansi, dan aparat di tingkat bawah agar tidak membolehkan para muballigh itu memberikan pengajian. Tidak hanya berhenti sampai pelarangan berkhotbah dan ceramah pengajian, tetapi juga dilakukan penyeretan, pemukulan, bahkan sampai dengan penculikan. Sebagai contoh kasus AM Fatwa seorang muballigh kondang di Jakarta. Ia diculik oleh para perwira dan dipukuli sampai babak belur. Para penasihat hukum yang akan membela nasib AM Fatwa, disuruh mengundurkan diri dari kasus ini oleh Sudomo (hlm 28). Kisah-kisah nyata represif penguasa terhadap para muballigh masih banyak (baik yang dituturkan dalam buku ini, maupun yang belum dibukukan).

Kasus yang besar ialah Tanjung Priok, yaitu kasus penodaan mushola As Sa' adah. Puncaknya pada 12 September 1984 malam hari, yaitu pembantaian terhadap kurang lebih 600 jamaah pengajian yang tidak bersenjata. Mereka diberondong peluru hingga wafat (syahidnya), mayatnya dilempar ke dalam truk bertumpuk-tumpuk, kemudian sebagian dikremasi di Cilincing dan lainnya belum diketahui kuburnya (32 – 35).

Buku ini menguraikan peristiwa Tanjung Priok secara gamblang dan dengan fakta akurat. Di samping, juga membuka tabir keborokan pemerintah dalam hal pemutarbalikan berita dan penyembunyian fakta sebenarnya. Para korban Tanjung Priok yang selamat justru diadili dan dianggap bersalah.

Namun, dari pengadilan itulah terbongkar kesaksian sebenarnya. Surat kabar, TVRI, dan media massa lainnya tidak berani memuat kesaksian dalam pengadilan (mungkin dilarang), tetapi dari buku inilah kita baru dapat mengetahuinya (hlm 35 – 55).

Buku ini juga memuat adanya berbagai tindakan represif pada sistem peradilan, persidangan kasus-kasus muballigh, persidangan kasus peledakan bom, dan persidangan kasus Uspol di Jawa Tengah.

Buku ini diperkaya pula oleh lampiran, antara lain:

- (1) kesaksian Yusron bin Zoinuri dalam persidangan H.R. Dhardono,
- (2) kesaksian Edi dalam persidangan H.R. Dharsono,
- (3) kesaksian media massa pada persidangan H.R. Dharsono,

- (4) persidangan Sanusi,
- (5) lembaran putih tentang Peristiwa Tanjung Priok,
- (6) pengumuman khusus dari KOPKAMTIB
- (7) nama-nama napol Muslim,
- (8) gambar korban diskriminasi.

Setelah kita baca buku ini dan melihat realitas yang ada, umat Islam Indonesia telah mendapat musibah yang besar, teraniaya, dan perlakuan tidak adil. Di samping itu, dirasakan adanya perlakuan tidak adil dan diskriminatif dari pihak-pihak yang sering memperjuangkan hak azasi manusia. Terbukti jika umat Islam yang mendapatkan musibah besar kasusnya, tidak diperjuangkan secara maksimal. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran yang berharga buat umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia secara umum.